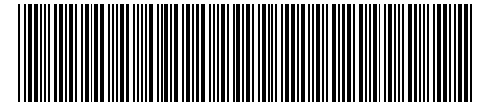




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.01.2.408751/2024**



DS:0833-2938-8724-5807

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 4. Kode>Nama Satker : (408751) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
- Sebesar : Rp. 24.410.146.000 (DUA PULUH EMPAT MILIAR EMPAT RATUS SEPULUH JUTA SERATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.01.WA Program Dukungan Manajemen

013.01.WA. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

	Jumlah Uang
Rp.	24.410.146.000
Rp.	24.410.146.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	24.410.146.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SURABAYA II (135) Rp. 24.410.146.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408751/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



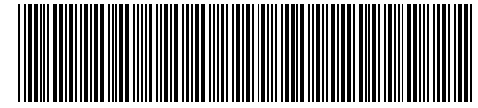
DS:0833-2938-8724-5807

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408751) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

Halaman : I A. 1

Program	:	013.01.WA	Program Dukungan Manajemen			24.410.146.000		
Kegiatan	:	1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM			24.410.146.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	1558.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	19.139.301.000	
Rincian Output	:	01	EBA.956	Layanan BMN	1,00	Layanan	650.847.000	
			02	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1,00	Layanan	759.897.000
			03	EBA.959	Layanan Protokoler	1,00	Layanan	180.498.000
			04	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	11.248.000
			05	EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	165.124.000
			06	EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	17.371.687.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1558.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	119,00	Unit, m2, Paket	1.877.780.000	
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal	117,00	Unit	673.280.000	
			02	EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2,00	Unit	1.204.500.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1558.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.178.519.000	
Rincian Output	:	01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1,00	Layanan	1.178.519.000	
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1558.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.214.546.000	
Rincian Output	:	01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	858.872.000	
			02	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	460.637.000
			03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen	449.549.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408751/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0833-2938-8724-5807

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408751) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM JAWA TIMUR

Halaman : I A. 2

Layanan Manajemen Kinerja Internal			Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		
04	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Dokumen	389.188.000
05	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Dokumen	56.300.000

Jakarta, 24 November 2023
Sekretaris Jenderal

ttd.

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.01.2.408751/2024

I B. SUMBER DANA



DS:0833-2938-8724-5807

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 Kode>Nama Satker : (408751) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	24.410.146.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	24.410.146.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408751/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



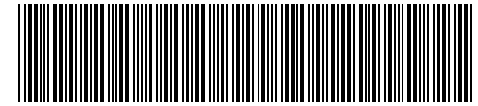
DS:0833-2938-8724-5807

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408751) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408751	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	12.716.793	9.815.573	1.877.780	-	-	24.410.146		
013.01.WA	Program Dukungan Manajemen	12.716.793	9.815.573	1.877.780	-	-	24.410.146		
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	12.716.793	9.815.573	1.877.780	-	-	24.410.146		
1558.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	12.716.793	6.422.508	-	-	-	19.139.301	05.51	
01	RM	12.716.793	6.422.508	-	-	-	19.139.301	135	
1558.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	-	1.877.780	-	-	1.877.780	05.51	
01	RM	-	-	1.877.780	-	-	1.877.780	135	
1558.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	1.178.519	-	-	-	1.178.519	05.51	
01	RM	-	1.178.519	-	-	-	1.178.519	135	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408751/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0833-2938-8724-5807

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408751) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

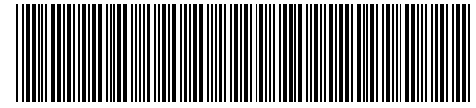
KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1558.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	2.214.546	-	-	-	2.214.546	05 . 51	
01	RM	-	2.214.546	-	-	-	2.214.546	135	
JUMLAH		12.716.793	9.815.573	1.877.780	-	-	24.410.146		

Jakarta, 24 November 2023
Sekretaris Jenderal

ttd.

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408751/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0833-2938-8724-5807

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408751) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

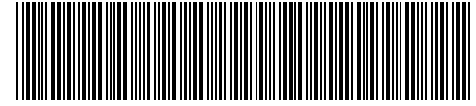
NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408751	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.590.878	1.838.835	2.009.204	2.644.383	1.599.035	3.144.059	1.963.498	1.804.943	2.251.224	1.737.938	1.572.659	2.253.488	24.410.146
		BELANJA PEGAWAI	884.865	884.865	884.865	1.769.750	884.865	1.852.458	884.865	884.865	884.865	884.865	884.865	1.130.798	12.716.793
		BELANJA BARANG	706.013	608.380	796.649	794.633	714.170	997.251	837.508	775.403	990.009	853.073	687.794	1.054.690	9.815.573
		BELANJA MODAL	0	345.590	327.690	80.000	0	294.350	241.125	144.675	376.350	0	0	68.000	1.877.780
	013.01.WA.1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1.590.878	1.838.835	2.009.204	2.644.383	1.599.035	3.144.059	1.963.498	1.804.943	2.251.224	1.737.938	1.572.659	2.253.488	24.410.146
		51 BELANJA PEGAWAI	884.865	884.865	884.865	1.769.750	884.865	1.852.458	884.865	884.865	884.865	884.865	884.865	1.130.798	12.716.793
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	706.013	608.380	796.649	794.633	714.170	997.251	837.508	775.403	990.009	853.073	687.794	1.054.690	9.815.573
		53 BELANJA MODAL	0	345.590	327.690	80.000	0	294.350	241.125	144.675	376.350	0	0	68.000	1.877.780

Jakarta, 24 November 2023
Sekretaris Jenderal

ttd.

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408751/2024
IV A. B L O K I R**



DS:0833-2938-8724-5807

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [408751] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Sekretaris Jenderal

ttd.
KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408751/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:0833-2938-8724-5807

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [408751] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

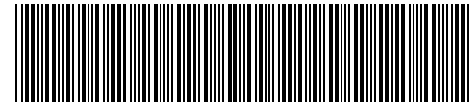
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Sekretaris Jenderal

ttd.
KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.03.2.408753/2024**



DS:6823-5450-9720-0036

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
 3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 4. Kode>Nama Satker : (408753) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
- Sebesar : Rp. 5.038.044.000 (LIMA MILIAR TIGA PULUH DELAPAN JUTA EMPAT PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.03.BF.5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	5.038.044.000
Rp.	5.038.044.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	5.038.044.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SURABAYA II (135) Rp. 5.038.044.000

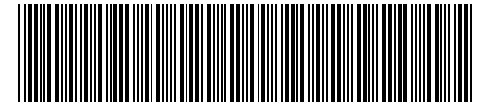
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408753/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6823-5450-9720-0036

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408753) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

Halaman : I A. 1

Program	:	013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		5.038.044.000
Kegiatan	:	5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		5.038.044.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan		
		2. 01	Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah		
		3. 01	Persentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan		
Klasifikasi Rincian Output	1	:	5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4,00 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik 2.237.598.000
Rincian Output		:	01 BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4,00 layanan 2.237.598.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1,00 Perkara, Berkas Perkara 44.400.000
Rincian Output		:	01 BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	1,00 Perkara 44.400.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	22,00 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan 2.756.046.000
Rincian Output		:	01 BIC.001	Pengawasan kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	22,00 Lembaga 2.756.046.000

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

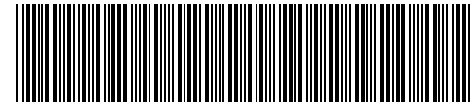
ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.03.2.408753/2024

I B. SUMBER DANA



DS:6823-5450-9720-0036

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
 Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 Kode>Nama Satker : (408753) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

Halaman : I B. 1

		Rp.	5.038.044.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2024					(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni			0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB			5.038.044.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri			0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri			0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung			0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS			0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408753/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6823-5450-9720-0036

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408753) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408753	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	-	5.038.044	-	-	-	5.038.044		
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	5.038.044	-	-	-	5.038.044		
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	5.038.044	-	-	-	5.038.044		
5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	2.237.598	-	-	-	2.237.598	05 . 51	
04	PNBP	-	2.237.598	-	-	-	2.237.598	135	
5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	44.400	-	-	-	44.400	05 . 51	
04	PNBP	-	44.400	-	-	-	44.400	135	
5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	2.756.046	-	-	-	2.756.046	05 . 51	
04	PNBP	-	2.756.046	-	-	-	2.756.046	135	
JUMLAH		-	5.038.044	-	-	-	5.038.044		

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408753/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6823-5450-9720-0036

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408753) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408753	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	260.023	495.475	993.801	450.891	409.850	582.634	270.713	827.969	371.392	123.194	252.102	5.038.044
		BELANJA BARANG	0	260.023	495.475	993.801	450.891	409.850	582.634	270.713	827.969	371.392	123.194	252.102	5.038.044
	013.03.BF.5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	260.023	495.475	993.801	450.891	409.850	582.634	270.713	827.969	371.392	123.194	252.102	5.038.044
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	260.023	495.475	993.801	450.891	409.850	582.634	270.713	827.969	371.392	123.194	252.102	5.038.044

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408753/2024
IV A. B L O K I R**



DS:6823-5450-9720-0036

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [408753] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

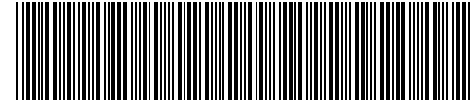
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408753/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:6823-5450-9720-0036

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [408753] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

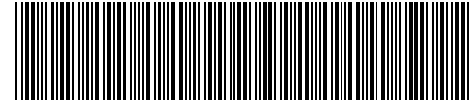
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.408754/2024**



DS:4193-9681-1869-6571

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
 3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 4. Kode>Nama Satker : (408754) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
- Sebesar : Rp. 2.739.816.000 (DUA MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.05.BF.5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	2.739.816.000
Rp.	2.739.816.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	2.739.816.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SURABAYA II (135) Rp. 2.739.816.000

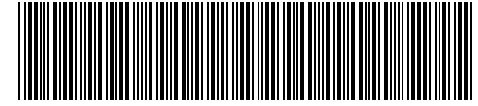
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408754/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



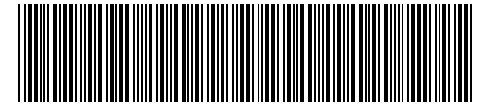
DS:4193-9681-1869-6571

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408754) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

Halaman : I A. 1

Program	: 013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.739.816.000
Kegiatan	: 5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	2.739.816.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	
	: 2. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
	: 3. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
	: 4. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
	: 5. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
	: 6. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
	: 7. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	: 8. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
	: 9. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
	: 10. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
	: 11. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
	: 12. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	
	: 13. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
	: 14. 02	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	: 15. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
	: 16. 03	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
	: 17. 03	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	
	: 18. 03	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
	: 19. 03	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	
	: 20. 03	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	
	: 21. 03	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408754/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4193-9681-1869-6571

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408754) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

Halaman : I A. 2

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

- 22. 04 Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
- 23. 04 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
- 24. 04 Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
- 25. 04 Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
- 26. 05 Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
- 27. 05 Persentase tahanan/harapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- 28. 06 Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
- 29. 06 Persentase tahanan/harapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- 30. 07 Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
- 31. 07 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
- 32. 08 Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Klasifikasi Rincian Output	1	:	5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	208,00	orang	467.516.000
Rincian Output		:	01 AEF.001	Pembinaan Layanan Pemasarakatan di Wilayah	208.00	orang	467.516.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5252.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	52,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	1.809.991.000
Rincian Output		:	01 BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan UPT Pemasarakatan	52.00	Unit Kerja	1.809.991.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi, Hari Operasi	462.309.000
Rincian Output		:	01 BHB.001	Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	12.00	operasi	462.309.000

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Pemasarakatan

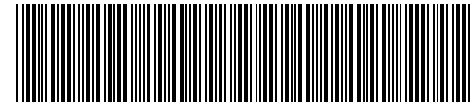
ttd.
Reynhard Silitonga
NIP. 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.05.2.408754/2024

I B. SUMBER DANA



DS:4193-9681-1869-6571

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
 Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 Kode>Nama Satker : (408754) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	2.739.816.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	2.739.816.000		(2) RPLN	US\$		0	Rp.		0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408754/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4193-9681-1869-6571

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408754) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408754	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	-	2.739.816	-	-	-	2.739.816		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.739.816	-	-	-	2.739.816		
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	-	2.739.816	-	-	-	2.739.816		
5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	467.516	-	-	-	467.516	05 . 51	
01	RM	-	467.516	-	-	-	467.516	135	
5252.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	1.809.991	-	-	-	1.809.991	05 . 51	
01	RM	-	1.809.991	-	-	-	1.809.991	135	
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	462.309	-	-	-	462.309	05 . 51	
01	RM	-	462.309	-	-	-	462.309	135	
JUMLAH		-	2.739.816	-	-	-	2.739.816		

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408754/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4193-9681-1869-6571

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408754) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408754	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	76.568	140.222	151.110	206.207	346.785	373.809	378.164	365.163	136.556	282.664	205.850	76.717	2.739.816
		BELANJA BARANG	76.568	140.222	151.110	206.207	346.785	373.809	378.164	365.163	136.556	282.664	205.850	76.717	2.739.816
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	76.568	140.222	151.110	206.207	346.785	373.809	378.164	365.163	136.556	282.664	205.850	76.717	2.739.816
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	76.568	140.222	151.110	206.207	346.785	373.809	378.164	365.163	136.556	282.664	205.850	76.717	2.739.816

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408754/2024
IV A. B L O K I R**



DS:4193-9681-1869-6571

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [408754] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408754/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:4193-9681-1869-6571

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [408754] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

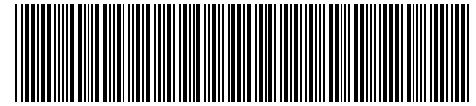
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NIP. 67090332



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.06.2.408755/2024**



DS:3661-9827-9880-0757

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
 3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 4. Kode>Nama Satker : (408755) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
- Sebesar : Rp. 1.656.799.000 (SATU MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.06.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

013.06.BF.5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	1.656.799.000
Rp.	1.656.799.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	1.656.799.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SURABAYA II (135) Rp. 1.656.799.000

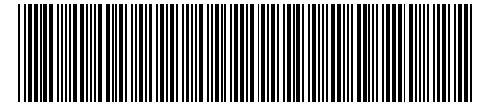
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408755/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3661-9827-9880-0757

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408755) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

Halaman : I A. 1

Program	: 013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.656.799.000
Kegiatan	: 5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			1.656.799.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani			
	: 2. 01	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima			
	: 3. 02	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 5254.BHB	Operasi Bidang Keamanan	30,00	operasi, Hari Operasi	531.201.000
Rincian Output	: 01	BHB.U01 Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah	20.00	operasi	214.312.000
	: 02	BHB.U02 Operasi Mandiri di Wilayah	8.00	operasi	183.955.000
	: 03	BHB.U03 Operasi Gabungan di Wilayah	1.00	operasi	62.155.000
	: 04	BHB.U04 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1.00	operasi	70.779.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 5254.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	20,00	Orang, Laporan	1.018.478.000
Rincian Output	: 01	BIB.004 Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian	20.00	Laporan	1.018.478.000
Klasifikasi Rincian Output 3	: 5254.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	2,00	laporan	107.120.000
Rincian Output	: 01	BKA.001 Pengawasan Orang Asing	2.00	laporan	107.120.000

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Imigrasi

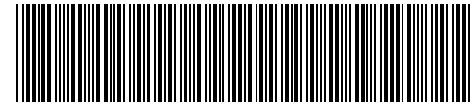
ttd.
Silmy Karim, S.E., M.E.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.06.2.408755/2024

I B. SUMBER DANA



DS:3661-9827-9880-0757

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
 Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 Kode>Nama Satker : (408755) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

		Rp.	1.656.799.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2024					(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni			0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB			1.656.799.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri			0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri			0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung			0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS			0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408755/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3661-9827-9880-0757

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408755) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408755	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	-	1.656.799	-	-	-	1.656.799		
013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.656.799	-	-	-	1.656.799		
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	-	1.656.799	-	-	-	1.656.799		
5254.BHB	Operasi Bidang Keamanan (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	531.201	-	-	-	531.201	05.51	
04	PNBP	-	531.201	-	-	-	531.201	135	
5254.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	1.018.478	-	-	-	1.018.478	05.51	
04	PNBP	-	1.018.478	-	-	-	1.018.478	135	
5254.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	107.120	-	-	-	107.120	05.51	
04	PNBP	-	107.120	-	-	-	107.120	135	
JUMLAH		-	1.656.799	-	-	-	1.656.799		

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Silmy Karim, S.E., M.E.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408755/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3661-9827-9880-0757

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408755) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408755	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	80.856	179.925	152.063	122.985	152.313	122.485	152.313	306.902	223.092	122.485	41.379	1.656.799
		BELANJA BARANG	0	80.856	179.925	152.063	122.985	152.313	122.485	152.313	306.902	223.092	122.485	41.379	1.656.799
	013.06.BF.5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	0	80.856	179.925	152.063	122.985	152.313	122.485	152.313	306.902	223.092	122.485	41.379	1.656.799
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	80.856	179.925	152.063	122.985	152.313	122.485	152.313	306.902	223.092	122.485	41.379	1.656.799

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Silmy Karim, S.E., M.E.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408755/2024
IV A. B L O K I R**



DS:3661-9827-9880-0757

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [06] Ditjen Imigrasi
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [408755] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Silmy Karim, S.E., M.E.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408755/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:3661-9827-9880-0757

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [06] Ditjen Imigrasi
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [408755] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

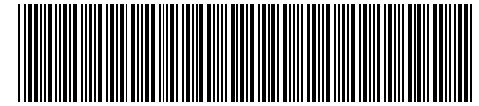
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Silmy Karim, S.E., M.E.



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.07.2.408756/2024**



DS:2295-3864-9502-9940

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
 3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 4. Kode>Nama Satker : (408756) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
- Sebesar : Rp. 3.219.752.000 (TIGA MILIAR DUA RATUS SEMBILAN BELAS JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.07.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

013.07.BF.5253 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	3.219.752.000
Rp.	3.219.752.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	3.219.752.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SURABAYA II (135) Rp. 3.219.752.000

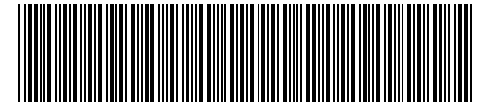
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408756/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2295-3864-9502-9940

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408756) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

Halaman : I A. 1

Program	:	013.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			3.219.752.000
Kegiatan	:	5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			3.219.752.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Penegakan hukum KI di Wilayah			
		2. 01	Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah			
		3. 02	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	5253.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3.200,00	Orang	3.130.058.000
Rincian Output	:	01	BDC.001 Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	1550.00	Orang	1.999.134.000
		02	BDC.002 Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	150.00	Orang	158.720.000
		03	BDC.003 Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1500.00	Orang	972.204.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5253.BKB Pemantauan produk	4,00	laporan	89.694.000
Rincian Output	:	01	BKB.001 Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	4,00	laporan	89.694.000

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

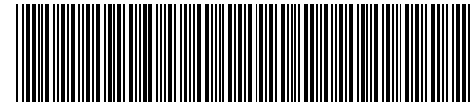
ttd.
MIN USIHEN, S.H., M.H.
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.07.2.408756/2024

I B. SUMBER DANA



DS:2295-3864-9502-9940

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
 Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 Kode>Nama Satker : (408756) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	3.219.752.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	3.219.752.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408756/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2295-3864-9502-9940

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408756) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
Kewenangan : (KD)

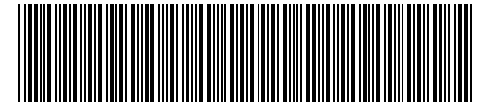
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408756	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	-	3.219.752	-	-	-	3.219.752		
013.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	3.219.752	-	-	-	3.219.752		
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	3.219.752	-	-	-	3.219.752		
5253.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	3.130.058	-	-	-	3.130.058	05 . 51	
04	PNBP	-	3.130.058	-	-	-	3.130.058	135	
5253.BKB	Pemantauan produk (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	89.694	-	-	-	89.694	05 . 51	
04	PNBP	-	89.694	-	-	-	89.694	135	
JUMLAH		-	3.219.752	-	-	-	3.219.752		

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
MIN USIHEN, S.H., M.H.
NIP. 196903091994032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408756/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2295-3864-9502-9940

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408756) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408756	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	238.140	237.190	856.540	312.950	559.308	112.834	386.006	217.190	214.766	47.240	37.588	3.219.752
		BELANJA BARANG	0	238.140	237.190	856.540	312.950	559.308	112.834	386.006	217.190	214.766	47.240	37.588	3.219.752
	013.07.BF.5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	0	238.140	237.190	856.540	312.950	559.308	112.834	386.006	217.190	214.766	47.240	37.588	3.219.752
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	238.140	237.190	856.540	312.950	559.308	112.834	386.006	217.190	214.766	47.240	37.588	3.219.752

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
MIN USIHEN, S.H., M.H.
NIP. 196903091994032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408756/2024
IV A. B L O K I R**



DS:2295-3864-9502-9940

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [408756] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
MIN USIHEN, S.H., M.H.
NIP. 196903091994032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408756/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:2295-3864-9502-9940

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [408756] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

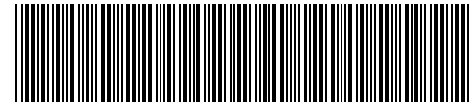
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
MIN USIHEN, S.H., M.H.
NIP. 196903091994032001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.408757/2024**



DS:8200-3821-1645-9047

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
 3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 4. Kode>Nama Satker : (408757) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
- Sebesar : Rp. 498.000.000 (EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.BB Program Pembentukan Regulasi

013.08.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 498.000.000

Rp. 498.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	498.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SURABAYA II (135) Rp. 498.000.000

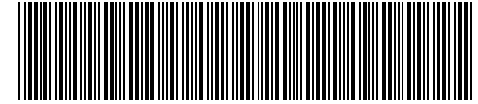
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408757/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8200-3821-1645-9047

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408757) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

Halaman : I A. 1

Program	:	013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi			498.000.000
Kegiatan	:	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			498.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan			
		2. 01	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	24,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	358.101.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	24,00	Rekomendasi Kebijakan	358.101.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	29,00	Orang	139.899.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	29,00	Orang	139.899.000

Jakarta, 24 November 2023

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.

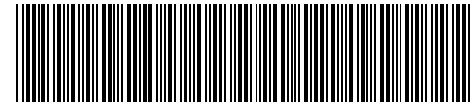
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum
NIP. 196908141996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.08.2.408757/2024

I B. SUMBER DANA



DS:8200-3821-1645-9047

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
 Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 Kode>Nama Satker : (408757) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

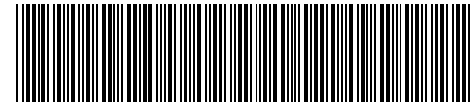
Halaman : I B. 1

		Rp.	498.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2024					(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni		Rp.	498.000.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB		Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung		Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS		Rp.	0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408757/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8200-3821-1645-9047

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408757) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
Kewenangan : (KD)

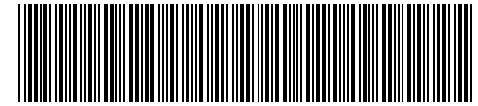
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408757	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	-	498.000	-	-	-	498.000		
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	498.000	-	-	-	498.000		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	498.000	-	-	-	498.000		
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	358.101	-	-	-	358.101	05 . 51	
01	RM	-	358.101	-	-	-	358.101	135	
5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	139.899	-	-	-	139.899	05 . 51	
01	RM	-	139.899	-	-	-	139.899	135	
JUMLAH		-	498.000	-	-	-	498.000		

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408757/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8200-3821-1645-9047

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408757) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408757	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	20.000	31.246	52.500	39.500	97.000	45.000	60.000	47.060	50.000	39.064	16.630	498.000
		BELANJA BARANG	0	20.000	31.246	52.500	39.500	97.000	45.000	60.000	47.060	50.000	39.064	16.630	498.000
	013.08.BB.5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	0	20.000	31.246	52.500	39.500	97.000	45.000	60.000	47.060	50.000	39.064	16.630	498.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	20.000	31.246	52.500	39.500	97.000	45.000	60.000	47.060	50.000	39.064	16.630	498.000

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408757/2024
IV A. B L O K I R**



DS:8200-3821-1645-9047

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [408757] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

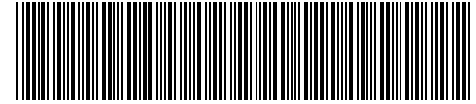
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408757/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:8200-3821-1645-9047

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [408757] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

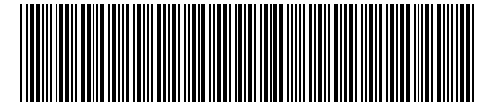
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum
NIP. 196908141996031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.09.2.408758/2024**



DS:7099-0128-8344-1935

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
 3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 4. Kode>Nama Satker : (408758) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
- Sebesar : Rp. 349.598.000 (TIGA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.09.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM
013.09.BG. Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

		Jumlah Uang
Rp.	349.598.000	
Rp.	349.598.000	

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 349.598.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SURABAYA II (135) Rp. 349.598.000

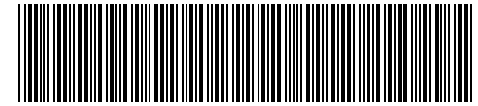
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408758/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7099-0128-8344-1935

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408758) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

Halaman : I A. 1

Program	: 013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM			349.598.000
Kegiatan	: 5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah			349.598.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM			
	: 2. 01	Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah			
	: 3. 02	Jumlah kab/kota peduli HAM			
	: 4. 03	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 5255.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	71.755.000
Rincian Output	: 01 BAH.001	Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	1,00	layanan	71.755.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 5255.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	35.869.000
Rincian Output	: 01 BDB.001	Fasilitasi Pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM	1,00	Lembaga	35.869.000
Klasifikasi Rincian Output 3	: 5255.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	10,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	241.974.000
Rincian Output	: 01 FBA.001	Fasilitasi Aksi HAM di Wilayah	3,00	Kab/Kota	100.509.000
	: 02 FBA.002	Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	3,00	Kab/Kota	78.795.000
	: 03 FBA.003	Penilaian Kab/Kota Peduli HAM di Wilayah	3,00	Kab/Kota	49.245.000
	: 04 FBA.004	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Berperspektif HAM di Wilayah	1,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	13.425.000

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

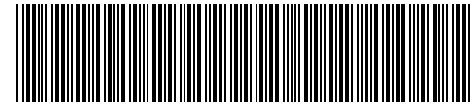
ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.09.2.408758/2024

I B. SUMBER DANA



DS:7099-0128-8344-1935

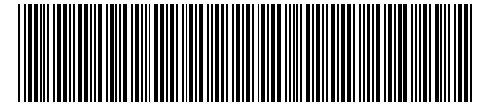
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
 Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 Kode>Nama Satker : (408758) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	349.598.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	349.598.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408758/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7099-0128-8344-1935

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408758) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
Kewenangan : (KD)

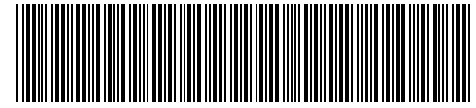
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408758	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	-	349.598	-	-	-	349.598		
013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	-	349.598	-	-	-	349.598		
5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	-	349.598	-	-	-	349.598		
5255.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	71.755	-	-	-	71.755	05 . 51	
01	RM	-	71.755	-	-	-	71.755	135	
5255.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	35.869	-	-	-	35.869	05 . 51	
01	RM	-	35.869	-	-	-	35.869	135	
5255.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	241.974	-	-	-	241.974	05 . 51	
01	RM	-	241.974	-	-	-	241.974	135	
JUMLAH		-	349.598	-	-	-	349.598		

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408758/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7099-0128-8344-1935

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408758) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408758	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	40.746	49.305	67.911	30.805	40.755	37.139	22.095	18.540	14.180	28.122	349.598
		BELANJA BARANG	0	0	40.746	49.305	67.911	30.805	40.755	37.139	22.095	18.540	14.180	28.122	349.598
	013.09.BG.5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	0	0	40.746	49.305	67.911	30.805	40.755	37.139	22.095	18.540	14.180	28.122	349.598
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	40.746	49.305	67.911	30.805	40.755	37.139	22.095	18.540	14.180	28.122	349.598

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408758/2024
IV A. B L O K I R**



DS:7099-0128-8344-1935

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [09] Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [408758] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408758/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:7099-0128-8344-1935

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [09] Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [408758] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.408759/2024**



DS:0001-2401-8469-5506

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 4. Kode>Nama Satker : (408759) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
- Sebesar : Rp. 6.987.374.000 (ENAM MILIAR SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	6.987.374.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SURABAYA II (135) Rp. 6.987.374.000

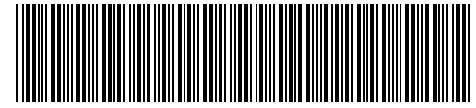
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408759/2024

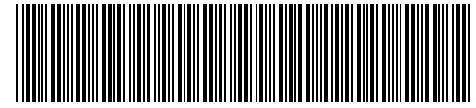


DS:0001-2401-8469-5506

Satker : (408759) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	146.941.000
BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	146.941.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	6.840.433.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	6.840.433.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408759/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



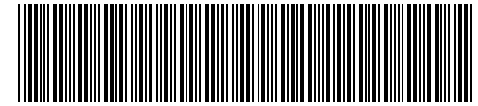
DS:0001-2401-8469-5506

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408759) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

Halaman : I A. 1

Program	: 013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			146.941.000
Kegiatan	: 5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah			146.941.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan			
	: 2. 02	Jumlah fasilitas Perencanaan Perda			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	84.000.000
Rincian Output	: 01 ABD.001	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	84.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 5256.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	62.941.000
Rincian Output	: 01 BDB.001	Fasilitas Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	62.941.000
Program	: 013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			6.840.433.000
Kegiatan	: 4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			6.840.433.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah			
	: 2. 01	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan/permintaan layanan bantuan hukum litigasi			
	: 3. 01	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap dari usulan kantor wilayah			
	: 4. 02	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan/permintaan layanan bantuan hukum non-litigasi			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 4841.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	10,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	103.376.000
Rincian Output	: 01 BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	10,00	Lembaga	103.376.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408759/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0001-2401-8469-5506

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408759) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		17,00	Kelompok Masyarakat	178.125.000
Rincian Output		:	01	BDD.001	Layanan penyuluhan hukum di Daerah	2,00	Kelompok Masyarakat	64.620.000
		:	02	BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	15,00	Kelompok Masyarakat	113.505.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		65,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	72.681.000
Rincian Output		:	01	BIC.001	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	65,00	Lembaga	72.681.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.PDE	Akreditasi Lembaga		65,00	Lembaga, Unit Kerja	101.911.000
Rincian Output		:	01	PDE.001	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah (PN)	65,00	Lembaga	101.911.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		662,00	Orang	5.296.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	662,00	Orang	5.296.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		102,00	Kelompok Masyarakat, Kegiatan	1.088.340.000
Rincian Output		:	01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	102,00	Kegiatan	1.088.340.000

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

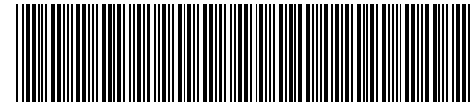
ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.10.2.408759/2024

I B. SUMBER DANA



DS:0001-2401-8469-5506

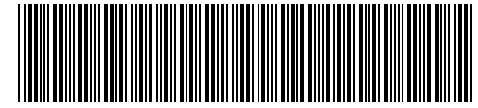
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 Kode>Nama Satker : (408759) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	6.987.374.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	6.987.374.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408759/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



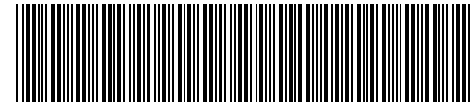
DS:0001-2401-8469-5506

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408759) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408759	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	-	6.977.374	10.000	-	-	6.987.374		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	146.941	-	-	-	146.941		
5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	146.941	-	-	-	146.941		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	84.000	-	-	-	84.000	05.51	
01	RM	-	84.000	-	-	-	84.000	135	
5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	62.941	-	-	-	62.941	05.51	
01	RM	-	62.941	-	-	-	62.941	135	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	6.830.433	10.000	-	-	6.840.433		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	6.830.433	10.000	-	-	6.840.433		
4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	93.376	10.000	-	-	103.376	05.51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408759/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



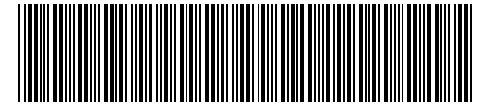
DS:0001-2401-8469-5506

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408759) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	93.376	10.000	-	-	103.376	135	
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	178.125	-	-	-	178.125	05.51	
01 RM		-	178.125	-	-	-	178.125	135	
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	72.681	-	-	-	72.681	05.51	
01 RM		-	72.681	-	-	-	72.681	135	
4841.PDE	Akreditasi Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	101.911	-	-	-	101.911	05.51	
01 RM		-	101.911	-	-	-	101.911	135	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	5.296.000	-	-	-	5.296.000	05.51	
01 RM		-	5.296.000	-	-	-	5.296.000	135	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408759/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0001-2401-8469-5506

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408759) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
Kewenangan : (KD)

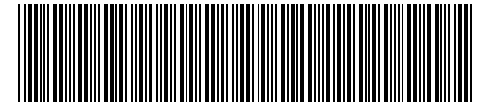
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	1.088.340	-	-	-	1.088.340	05 . 51	
01	RM	-	1.088.340	-	-	-	1.088.340	135	
JUMLAH		-	6.977.374	10.000	-	-	6.987.374		

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408759/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0001-2401-8469-5506

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408759) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

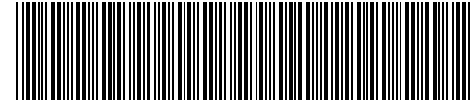
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408759	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	371	586.360	654.578	734.254	672.051	527.131	706.203	714.451	708.071	680.860	704.059	298.985	6.987.374
		BELANJA BARANG	371	586.360	654.578	734.254	672.051	527.131	699.588	711.066	708.071	680.860	704.059	298.985	6.977.374
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	6.615	3.385	0	0	0	0	10.000
013.10.BB.5256		Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	371	2.500	3.375	12.431	70.700	1.300	1.300	27.415	22.475	5.074	0	0	146.941
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	371	2.500	3.375	12.431	70.700	1.300	1.300	27.415	22.475	5.074	0	0	146.941
013.10.BF.4841		Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	0	583.860	651.203	721.823	601.351	525.831	704.903	687.036	685.596	675.786	704.059	298.985	6.840.433
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	583.860	651.203	721.823	601.351	525.831	698.288	683.651	685.596	675.786	704.059	298.985	6.830.433
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	6.615	3.385	0	0	0	0	10.000

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408759/2024
IV A. B L O K I R**



DS:0001-2401-8469-5506

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [408759] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408759/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:0001-2401-8469-5506

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [408759] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

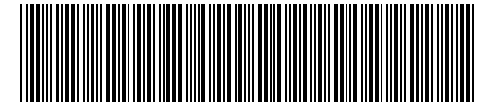
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.11.2.408760/2024**



DS:4108-1329-0220-2101

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 4. Kode>Nama Satker : (408760) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
- Sebesar : Rp. 415.040.000 (EMPAT RATUS LIMA BELAS JUTA EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.11.WA Program Dukungan Manajemen

013.11.WA. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	415.040.000
Rp.	415.040.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	415.040.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SURABAYA II (135) Rp. 415.040.000

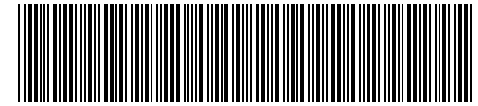
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408760/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4108-1329-0220-2101

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408760) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

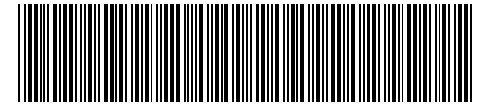
Halaman : I A. 1

Program	:	013.11.WA	Program Dukungan Manajemen			415.040.000
Kegiatan	:	5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah			415.040.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	415.040.000
Rincian Output	:	01	ABD.001 Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	4,00	Rekomendasi Kebijakan	407.722.000
	:	02	ABD.002 Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	7.318.000

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408760/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4108-1329-0220-2101

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408760) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408760	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	-	415.040	-	-	-	415.040		
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen	-	415.040	-	-	-	415.040		
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	-	415.040	-	-	-	415.040		
5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	415.040	-	-	-	415.040	05.51	
01	RM	-	415.040	-	-	-	415.040	135	
JUMLAH		-	415.040	-	-	-	415.040		

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408760/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4108-1329-0220-2101

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (408760) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

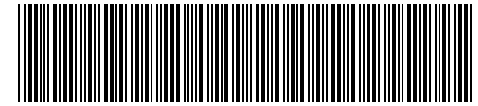
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408760	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	17.764	30.521	69.421	47.369	62.124	56.109	36.760	23.276	14.560	23.576	33.561	415.040
		BELANJA BARANG	0	17.764	30.521	69.421	47.369	62.124	56.109	36.760	23.276	14.560	23.576	33.561	415.040
	013.11.WA.5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	0	17.764	30.521	69.421	47.369	62.124	56.109	36.760	23.276	14.560	23.576	33.561	415.040
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	17.764	30.521	69.421	47.369	62.124	56.109	36.760	23.276	14.560	23.576	33.561	415.040

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408760/2024
IV A. B L O K I R**



DS:4108-1329-0220-2101

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [408760] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408760/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:4108-1329-0220-2101

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [408760] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002